

SINERGI TNI AL DAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN: ANALISIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

Irwan¹, Rizal Musa Karim²

Email: kompol_irwan@gmail.com¹

Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut (Seskoal)

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) dalam menegakkan hukum laut dalam yurisdiksi Polda Sulawesi Selatan, dengan fokus pada peningkatan keamanan nasional. Undang-Undang Pertahanan memandang keamanan nasional dari perspektif yang luas dan integral, mencakup keamanan wilayah darat, laut, dan udara, untuk melindungi negara dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. Studi ini menganalisis kerangka hukum, kerja sama operasional, dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai keamanan maritim yang efektif, dengan mempertimbangkan ancaman militer dan non-militer.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Penegakan Hukum Laut, UNCLOS, Sinergi.

Abstract: This study examines the collaboration between the Indonesian Navy (TNI-AL) and the Indonesian National Police (POLRI) in enforcing maritime law within the jurisdiction of the South Sulawesi Police Department (Polda Sulawesi Selatan), focusing on enhancing national security. The Defense Law views national security through a broad and integral perspective, encompassing land, sea, and air security, to protect the nation from all forms of threats that could disrupt sovereignty, territorial integrity, and the safety of the nation. This study analyzes the legal frameworks, operational cooperation, and challenges faced in achieving effective maritime security, considering both military and non-military threats.

Keywords: National Security, Maritime Law Enforcement, UNCLOS, Synergy.

PENDAHULUAN

Posisi geografis strategis Sulawesi Selatan, yang berbatasan dengan beberapa perairan internasional, menjadikannya area kritis untuk keamanan maritim dan penegakan hukum. Sinergi antara TNI-AL dan POLRI sangat penting untuk menjaga keamanan di wilayah ini, khususnya dalam memerangi pencurian ikan dan penyelundupan. Kerja sama ini diatur melalui Memorandum of Understanding yang menguraikan latihan bersama, program pendidikan, dan operasi gabungan. Inisiatif inisiatif ini sangat vital untuk mengelola zona maritim luas di bawah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur oleh UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan personel kunci dari TNI-AL dan POLRI, pengamatan operasi bersama, dan tinjauan dokumen operasional. Studi mengevaluasi efektivitas sinergi dalam operasi nyata dan latihan bersama, dengan fokus pada area yang dihighlight dalam MoU mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka keamanan nasional, penegakan hukum di laut oleh Polda Sulawesi Selatan memegang peranan kritis. Sulawesi Selatan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah perairan internasional dan merupakan jalur penting untuk transportasi maritim serta perdagangan internasional yang rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan illegal fishing.

Tabel 1 Tindak pidana di perairan Polda Sulawesi Selatan

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS	POSISI KASUS	KET
1	2	3	4	5
1	ILLEGAL FISHING	24 KASUS	- 10 KASUS : P21 TAHAP II - 14 KASUS : PELIMPAHAN	
2	ILLEGAL BBM	2 KASUS	- 2 KASUS : P21	
3	BAHAN PELEDAK (DETONATOR)	2 KASUS	- 2 KASUS : P21 TAHAP II	
4	TAMBANG PASIR	1 KASUS	- P21 TAHAP II	
5	NARKOTIKA	2 KASUS	- 1 KASUS : RESTORATIVE JUSTICE - 1 KASUS : TAHAP 1	
J U M L A H		31 KASUS	31 KASUS	

Temuan utama studi menunjukkan bahwa operasi gabungan telah secara signifikan meningkatkan keamanan maritim di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin berikut:

- a. Peningkatan berbagi sumber daya. Kemitraan strategis antar lembaga penegak hukum maritim memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Kapal patroli, personel, dan teknologi dapat dibagikan secara efektif untuk memperluas jangkauan operasi dan meningkatkan efisiensi.
- b. Respons taktis yang lebih baik. Operasi gabungan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam merespon insiden maritim, seperti perampokan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Komunikasi yang lancar dan pertukaran informasi real-time membantu tim penegak hukum maritim dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat.
- c. Penegakan hukum maritim yang lebih efektif. Operasi gabungan menghasilkan peningkatan penangkapan dan penyitaan terhadap pelanggar hukum maritim. Kapal-kapal ilegal dapat diidentifikasi dan dicegat dengan lebih mudah, dan bukti pelanggaran dapat dikumpulkan dan ditindaklanjuti secara lebih komprehensif.

Meskipun operasi gabungan telah membawa dampak positif yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- a. Kejelasan yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, terdapat keraguan mengenai yurisdiksi atas suatu insiden maritim, terutama ketika terjadi di area perbatasan atau di laut lepas. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan perselisihan antar lembaga.
- b. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang tidak seimbang antar lembaga penegak hukum maritim dapat menyebabkan kesenjangan dalam kemampuan operasional. Beberapa lembaga mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan yang lain, sehingga berpotensi menghambat efektivitas operasi gabungan.

KESIMPULAN

Sinergi antara TNI-AL dan POLRI dalam kerangka keamanan nasional bukan hanya kebutuhan strategis tetapi juga pendekatan praktis untuk melindungi

kepentingan maritim Indonesia. Kolaborasi ini telah instrumental dalam meningkatkan kapabilitas operasional kedua kekuatan, memastikan pendekatan komprehensif terhadap keamanan nasional yang selaras dengan Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Polri. Rekomendasi masa depan termasuk meningkatkan saluran komunikasi, memperbanyak program pelatihan bersama, dan memperkuat kerangka hukum untuk mendukung otoritas yurisdiksi yang lebih jelas dan kerjasama yang lebih baik. Studi ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga keamanan nasional dan menyarankan cara-cara untuk mengoptimalkan kemitraan semacam itu untuk efektivitas yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiguna, Panji, Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di Wilayah Perairan. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Mungkasa, Oswar. Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan. 2022.
- Mashita, Sekar Mutiara, Dewi Rostyaningsih, dan Hesti Lestari. Sinergitas Stakeholder dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 12, 2023.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.